



statistik
politik dan keamanan
KOTA TERNATE





<https://ternatekota.kps.go.id>

statistik
politik dan keamanan
K O T A T E R N A T E

Statistik politik dan keamanan Kota Ternate 2017

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : 82710.1817

Katalog : 4601001.8271

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : viii + 64 halaman

Naskah :

BPS Kota Ternate

Penyunting:

BPS Kota Ternate

Desain Kover oleh:

BPS Kota Ternate

Penerbit:

BPS Kota Ternate

Pencetak:

Ilustrasi:

Pemilu oleh Abdur Rasyid

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Statistik Politik dan Keamanan
Kota Ternate 2017

Pengarah:

Muhammad Rismat R., SE, M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Muhammad Rismat R., SE, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Bimo Nugroho SST.

Penyunting:

Bimo Nugroho SST.

Penulis:

Bimo Nugroho SST.

Pengolah Data:

Laelatul Qomariyah SST

Desain:

Abdur Rasyid Karim Amrullah SST

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penyusunan publikasi **“Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2017”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Publikasi ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat, khususnya di Kota Ternate pada tahun 2017. Berbagai peristiwa politik terjadi dalam perhelatan demokrasi besar-besaran sejak tahun 1998 hingga 2017. Hal ini menunjukkan gairah politik yang kuat dari masyarakat, karena ruang politik yang semakin terbuka membuat semua orang berhak dan berpeluang menduduki jabatan publik lewat proses politik. Semangat tersebut juga dapat dilihat dari semakin kuatnya pengawasan terhadap pemerintah.

Diharapkan berbagai kajian dalam publikasi ini dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi serta sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, khususnya di bidang politik dan keamanan di Kota Ternate.

Disadari masih terdapat kelemahan dalam analisa data, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan ke depan. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima kasih dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Ternate, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Ternate

Muhammad Rismat R., SE, M.Si

Daftar Isi

TIM PENYUSUN	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	6
BAB II. Metodologi	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
2.2.1 Statistik Politik	10
2.2.2 Statistik Keamanan	13
2.3 Penjelasan Teknis	16
BAB III. Sekilas Tentang Kota Ternate	19
3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan	21
3.2 Kependudukan	22
BAB IV. Statistik Politik	25
4.1 Partisipasi Politik	27
4.2 Wakil Rakyat	29
4.3 Pemerintah Daerah	34
4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)	42

4.5 Kejadian Demonstrasi dan Kerusuhan	43
BAB V. Statistik Keamanan	47
5.2 Sarana dan Personil Keamanan	49
5.2 Jenis Tindak Kejahatan	51
5.3 Indikator Utama Kejahatan	58

<https://ternatekota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 3.1	Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Ternate, 2017.....	22
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Partisipasi dalam Pilkada Terakhir di Kota Ternate.....	29
Tabel 4.2	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	31
Tabel 4.3	Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	33
Tabel 4.4	Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate, 2015-2017.....	34
Tabel 4.5	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	35
Tabel 4.6	Jumlah PNS Menurut Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	36
Tabel 4.7	Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	37
Tabel 4.8	Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	38
Tabel 4.9	Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017.....	43
Tabel 4.10	Jumlah Konflik Sosial Masyarakat Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2016 – 2017.....	45
Tabel 5.1	Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	50
Tabel 5.2	Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	51
Tabel 5.3	Jumlah Kejahatan Menurut Kasusnya di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	53

Tabel 5.4	Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	56
Tabel 5.5	Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	57
Tabel 5.6	Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate, 2015 – 2017.....	60

<https://ternatekota.bps.go.id>



Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan di suatu wilayah bukanlah semata-mata diukur dari indikator sosial ekonomi semata seperti laju pertumbuhan ekonomi (LPE), nilai tukar petani (NTP), tingkat inflasi, maupun tingkat kemiskinan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh stabilitas kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut. Kesejahteraan dan stabilitas politik keamanan dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Kesejahteraan tidak akan tercapai tanpa situasi politik dan keamanan yang stabil. Begitu juga halnya dengan stabilitas politik dan keamanan tidak akan terwujud jika kondisi masyarakatnya tidak sejahtera.

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam area politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga 4 kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara diluar eksekutif yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah, sementara pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini

menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Berbagai perubahan tersebut memberi warna baru bagi sistem politik Indonesia. Beragam kepentingan dalam masyarakat diakomodir melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam.

Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh UUD 1945. Implementasi nyata pada era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah perlindungan bagi warga negara menjadi salah satu fokus utama dalam Nawa Cita, kerangka dasar pemerintahan

Jokowi-JK. Gatra pertama Nawa Cita terkait politik dan keamanan adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Stabilitas politik dan keamanan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun pencapaiannya tidak bisa terlepas dari partisipasi seluruh warga negara. Sehebat apapun kinerja Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, tanpa didukung oleh peran serta aktif masyarakat, maka hal itu sulit terwujud. Apalagi di era globalisasi dan teknologi informasi sekarang ini, berbagai ancaman yang berasal dari dalam dan luar dapat dengan mudahnya memecah persatuan dan kesatuan masyarakat.

Fenomena lain yang menarik akhir-akhir ini juga ditandai dengan meningkatnya tuntutan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu 2009 dan 2014, ketentuan kuota

minimal 30% perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

1.2 Tujuan

Penulisan publikasi “**Statistik Politik dan Keamanan Kota Ternate 2017**” ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan data gambaran mengenai kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kota Ternate pada tahun 2017.



Metodologi

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu melalui Survei Statistik Politik dan Keamanan. Survei ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2018 yang mengumpulkan data dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, di tingkat kota yang meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPUD), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan/Kejaksaan, dan Polda/Polres. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

2.2 Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No. 8 Tahun 2012).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8 Tahun 2012).

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara (UU No. 8 Tahun 2012).

Surat Suara dalam Pemilu adalah sebuah selebaran sah yang digunakan dalam pemilu. Dalam surat suara tertulis nama partai maupun nama dan foto calon. Seseorang yang memiliki hak pilih akan memilih salah satu hal dalam surat suara tersebut dengan cara mencoblos. Menurut Peraturan KPU No. 20 Tahun 2014, pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih di tempat pemungutan suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, atau foto calon. Pada proses penghitungan suara akan dilakukan penghitungan jumlah surat suara sah yang akan menentukan total suara yang diperoleh masing-masing calon. Sah atau tidaknya surat suara ditentukan pada saat penghitungan surat suara dengan disaksikan sejumlah saksi dan masyarakat umum.

Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih terhadap jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (UU No. 17 Tahun 2013). Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Oleh sebab itu, melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar. Adapun asas, ciri, dan sifat Ormas diantaranya:

- Asas : Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- Ciri : Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang dapat mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945
- Sifat : Ormas harus bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Dikutip dari www.kompasiana.com (Ormas Dapat Berperan Membangun Ketangguhan Masyarakat – 31 Oktober 2013), terdapat 3 peranan Ormas yaitu:

1. Sebagai simpul pengikat solidaritas warga masyarakat (*social bounding*) berdasarkan latar belakang dan karakteristik tertentu agar menjadi satu kekuatan yang bermakna bagi keseluruhan.
2. Sebagai jembatan penghubung (*social bridging*) dalam relasi antar kelompok sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan kerja sama antar sesama elemen masyarakat. Dengan adanya kerja sama ini, maka upaya untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi lebih mudah dan kohesifitas sosial menjadi lebih kuat.
3. Sebagai pembentuk jaringan (*social linking*) kerja sama yang lebih luas, baik dengan sesama elemen masyarakat maupun institusi kenegaraan sehingga aspirasi masyarakat menempati tempat yang memadai dalam kebijakan negara.

2.2.2 Statistik Keamanan

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, seperti Polda, dan dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi atau biasa disingkat AKBP.

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Polsek dikepalai oleh

seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Suatu Polsek dipimpin oleh seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Polisi juga merupakan aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian di Indonesia diatur lebih lanjut dalam UU No 28 Tahun 1997 dimana tugas utama polisi diantaranya:

- Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
- Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat demi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan masyarakat.

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah:

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Bilangan Pembagian Pemilihan DPRD (BPP DPRD) merupakan angka pembagi atau disebut sebagai harga kursi DPRD di suatu daerah pemilihan (dapil). Syarat suatu partai politik berhak mendapat alokasi kursi DPRD adalah jika perolehan suaranya sama dengan atau lebih besar dari BPP DPRD pada wilayah tersebut. Formula menghitung angka BPP DPRD suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$BPP\ DPRD\ dapil = \frac{Jumlah\ suara\ sah\ partai\ politik\ DPRD\ dapil}{Jumlah\ kursi\ DPRD\ dapil}$$

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (Clearance Rate) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$Clearance\ Rate = \frac{Jumlah\ kasus\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ tindak\ pidana\ pada\ tahun\ t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (Crime Clock) merupakan statistik yang mengindikasikan selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t} \text{ (detik)}$$

Semakin besar nilai *crime clock* mengindikasikan bahwa kejadian kejahatan semakin jarang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil angka *crime clock* mengindikasikan bahwa semakin rapat waktu antara satu kejadian tindak pidana dengan kejadian tindak pidana berikutnya, yang berarti semakin sering tindak pidana terjadi di wilayah tersebut.

Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

k = konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

<https://ternatekota.bps.go.id>

BAB III. Sekilas Tentang Kota Ternate

<https://ternatekota.bps.go.id>

<https://ternatekota.bps.go.id>

3.1 Letak Geografis dan Kewilayahan

Kota Ternate terletak di Provinsi Maluku Utara dengan koordinat $0^{\circ}25'41,82''$ – $1^{\circ}21'21,78''$ Lintang Utara dan antara $126^{\circ}07'32,14''$ – $127^{\circ}26'23,12''$ Bujur Timur. Secara geografis Kota Ternate dibatasi oleh:

- Utara : Laut Maluku
- Selatan : Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan
- Timur : Pulau Halmahera
- Barat : Laut Maluku

Luas Kota Ternate adalah $5.709,58 \text{ km}^2$ yang terdiri dari daratan $162,03 \text{ km}^2$ dan lautan $5.547,55 \text{ km}^2$.

Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang terdiri dari 3 pulau besar dan 5 pulau kecil. Wilayah administratif Kota Ternate terdiri dari 8 kecamatan dan 77 kelurahan. Kecamatan Ternate Barat adalah kecamatan paling muda (pemekaran dari Kecamatan Pulau Ternate) yang disahkan dengan Perda Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2016. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pulau Ternate ($37,23 \text{ km}^2$) dan yang terkecil adalah Kecamatan Pulau Hiri ($6,70 \text{ km}^2$). Ibukota kecamatan dan jumlah kelurahan masing-masing kecamatan di Kota Ternate bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Nama Ibukota Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di
Kota Ternate, 2017

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)
1. Pulau Ternate	Jambula	6
2. Moti	Moti Kota	6
3. Pulau Batang Dua	Mayau	6
4. Pulau Hiri	Faudu	6
5. Ternate Selatan	Kalumata	17
6. Ternate Tengah	Salahuddin	15
7. Ternate Utara	Dufa-Dufa	14
8. Ternate Barat	Sulamadaha	7
Kota Ternate		77

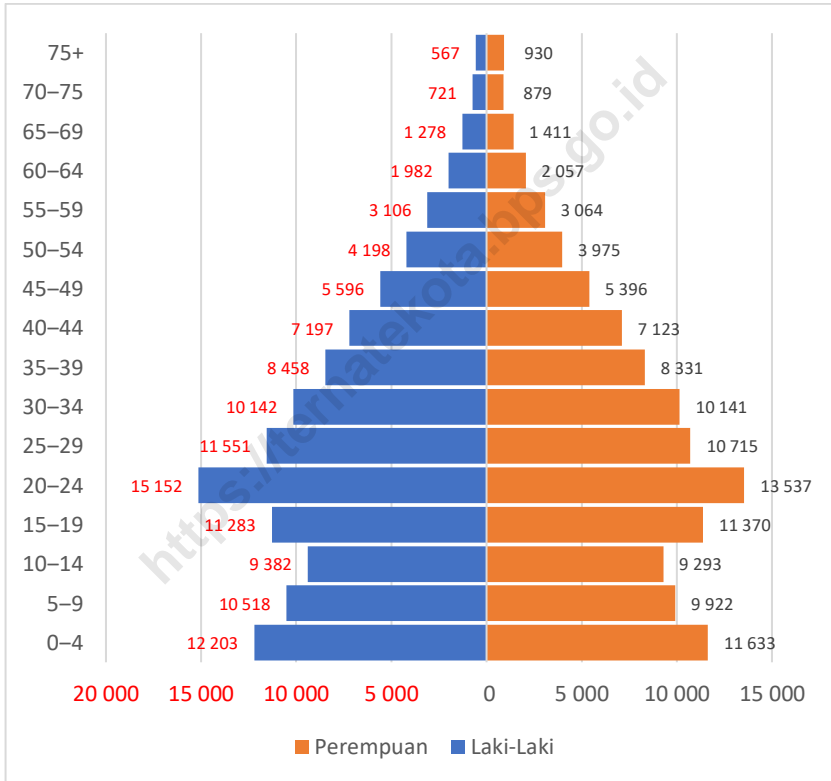
Sumber: BPS Kota Ternate

3.2 Kependudukan

Berdasarkan proyeksi, jumlah penduduk Kota Ternate tahun 2017 adalah 223.111 jiwa yang terdiri dari 113.334 jiwa laki-laki dan 109.777 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103.24. Jumlah penduduk ini mengalami pertumbuhan sebesar 2.33% dari tahun 2016. Kepadatan penduduk di Kota Ternate tahun 2017 adalah 1.797 jiwa/km². Proporsi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.1

Diagram Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia, 2010 - 2035

<https://ternatekota.bps.go.id>



Statistika Politik

<https://ternatekota.bps.go.id>

Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa terlepas dari politik, karena sejak lahir kita sudah menjadi warga dari sebuah organisasi politik yaitu Negara Indonesia. Tanpa politik suatu negara tidak akan bisa dipimpin dan diatur. Tapi bukan hanya dalam sistem pemerintahan, politik juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh sederhana adalah bagaimana anak-anak Sekolah Dasar sudah diajarkan untuk membentuk pengurus kelas dan memilih ketua kelasnya. Politik juga sangat kental dalam kehidupan keluarga, dimana seluruh keputusan selalu diambil berdasarkan diskusi di antara seluruh anggota keluarga. Proses diskusi inilah yang menjadi bagian dari politik, karena dapat dianalogikan sebagai musyawarah mufakat.

4.1 Partisipasi Politik

Perkembangan konstelasi politik yang semakin dinamis belakangan ini, tidak dapat dihindarkan telah menciptakan paradigma di masyarakat bahwa “politik itu kotor”. Padahal sebenarnya politik itu sama sekali tidak kotor, karena politik memiliki tujuan utama untuk menciptakan dan mengatur sistem yang teratur dalam mencapai tujuan tertentu. Hanya perilaku oknum dengan transaksi politik tersebutlah yang telah mencoreng makna politik itu sendiri di masyarakat.

Partisipasi politik di masyarakat akan jelas terlihat dari peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi salah satunya yaitu pemilihan umum (Pemilu) yang bebas. Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) pada 9 Desember 2015 merupakan Pemilu terakhir yang dilaksanakan di Kota Ternate yaitu Pemilihan Walikota dan Wakilnya untuk periode 2016 – 2021. Terdapat 4 pasang calon yang bertarung, 3 diusung oleh partai politik dan 1 berasal dari calon independen.

Pada Tabel 4.1 tersaji jumlah penduduk menurut partisipasi dalam Pilkada terakhir (yang dilaksanakan hanya 1 putaran) tanggal 9 Desember 2015 di Kota Ternate. Terdapat 3.784 orang atau 2,43% pemilih yang tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap). Mereka memilih dengan menggunakan KTP/Surat Keterangan, sedangkan 97,57% pemilih sudah terdaftar di DPT.

Dari sejumlah 156.025 pemilih total di Kota Ternate, terdapat 56,57% penduduk yang menggunakan hak pilihnya. Dari total 88.261 penduduk yang menggunakan pilihnya, terdapat 0,84% suara yang tidak sah. Sedangkan suara sahnya sebesar 99,16%.

Penduduk yang tidak menggunakan hak pilih atau biasa disebut Golongan Putih (Golput) pada Pilkada terakhir tersebut masih cukup besar di Kota Ternate yaitu 43,43% dari pemilih total, hampir mencapai setengah pemilih total. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat Ternate dalam pesta demokrasi masih cukup rendah.

Pasangan calon yang menang dalam Pilkada tersebut adalah Burhan Abdurahman – Abdullah Tahir yang didukung partai Demokrat, Hanura, PKB, PBB, dan PKPI dengan perolehan suara sebesar 34.647 atau 39,59% dari total suara sah.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Partisipasi dalam Pilkada
Terakhir di Kota Ternate

Partisipasi Pilkada 9 Desember 2015	Jumlah
(1)	(2)
1. Jumlah Pemilih Total	156.025
a. Jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT	152.241
b. Jumlah Pemilih dengan KTP/Surat Keterangan (tidak terdaftar di DPT)	3.784
2. Jumlah Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih	88.261
a. Jumlah Suara Sah	87.516
b. Jumlah Suara Tidak Sah	745
3. Jumlah Penduduk yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	67.764

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

4.2 Wakil Rakyat

Seluruh pesta demokrasi yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi rakyat dalam memilih wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, Gubernur-Wakil Gubernur, dan Bupati-Wakil Bupati) maupun legislatif (Anggota MPR-DPR-DPD sampai DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan dilantik untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota DPRD yang menjabat saat ini adalah DPRD untuk periode 2014 – 2019.

Fenomena keseluruhan partai politik tingkat nasional Pemilu 2014 mendapat alokasi kursi di DPRD Kota Ternate menunjukkan kecenderungan masyarakat Kota Ternate memberi perhatian pada semua partai politik, tidak hanya terpusat pada beberapa partai besar. Namun partai kecil pun mendapat kepercayaan. Hal ini juga menggambarkan bahwa masyarakat Kota Ternate “melek” politik dan mengikuti perkembangan politik nasional terkini. Kota Ternate memiliki iklim politik yang kondusif sehingga terbuka peluang bagi partai kecil untuk berkembang kedepannya apabila diupayakan strategi yang tepat. Partai politik yang mendapat alokasi kursi terbanyak ada 2 partai yaitu PDI Perjuangan dan PPP masing-masing 4 kursi atau sebanyak 13,33% dari total kursi.

Tabel 4.2

Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. PDI Perjuangan	3	1	4
2. Partai Persatuan Pembangunan	4	0	4
3. Partai Golkar	3	0	3
4. Partai Demokrat	2	1	3
5. Partai Nasional Demokrat	1	2	3
6. Partai Keadilan Sejahtera	2	0	2
7. Partai Amanat Nasional	1	1	2
8. Partai Hanura	2	0	2
9. Partai Bulan Bintang	2	0	2
10. Partai Gerindra	2	0	2
11. Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0	1
Jumlah	25	5	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

Berdasarkan hasil Pemilu 2014, jumlah anggota DPRD Kota Ternate adalah 30 orang, dengan 25 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Dalam persentase anggota DPRD Kota Ternate yang

perempuan hanya sebesar 16,67%. Rendahnya persentase keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi partai politik terkait kaderisasi. Kuota perempuan yang ditetapkan 30% dalam parlemen ternyata belum tercapai pada Pemilu 2014 ini.

Secara organisasi, lembaga wakil rakyat ini berasal dari 12 fraksi, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.2 Jumlah partai politik tingkat nasional yang terdaftar dalam Pemilu 2014 adalah sebanyak 12 fraksi dan kesemuanya mendapat alokasi kursi pada DPRD Kota Ternate.

Bila dilihat distribusinya menurut jenis partai, dapat dilihat pada Tabel 4.2 bahwa belum semua partai menempatkan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kota Ternate. Hanya 4 dari total 12 partai yang memiliki keterwakilan perempuan yaitu PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.

Posisi anggota DPRD adalah sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah Kota (Pemkot) Ternate. Posisi yang sangat strategis tersebut membutuhkan anggota DPRD yang handal dan amanah dalam mengemban amanat rakyat. Kualitas anggota dewan dapat dilihat salah satunya dari pendidikan yang ditamatkan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin luas pengetahuan dan cakrawala seseorang. Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar wakil rakyat ini sudah memiliki pendidikan

tertinggi DIV/S1 yaitu sebanyak 63,33%. Sedangkan lulusan SMA sebanyak 26,67% dan lulusan master sebanyak 10%.

Tabel 4.3
Jumlah Anggota DPRD Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. SMA/Sederajat	6	2	8
2. Diploma I, II, III	0	0	0
3. Tingkat Sarjana	17	2	19
4. Tingkat S2/Master	2	1	3
5. Tingkat S3/Doktor	0	0	0
Jumlah	25	5	30

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Pada tahun 2017 DPRD Kota Ternate telah menghasilkan 7 Perda dan 4 Perda yang diinisiasi oleh DPRD sebagaimana yang terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jumlah Perda yang Dihasilkan oleh DPRD Kota Ternate,
2015-2017

Jumlah Peraturan Daerah	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Peraturan Daerah	7	8	7
Jumlah Peraturan Daerah Inisiasi (Prakarsa) DPRD	2	2	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Ternate

4.3 Pemerintah Daerah

Roda Pemerintahan Kota Ternate digerakkan oleh aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil) yang berjumlah 4.838 orang. Tenaga penggerak tersebut didominasi oleh mereka yang berpendidikan sarjana (S1) yaitu sebanyak 50,68%. Jumlah PNS menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.5. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah PNS juga dapat dikatakan sudah mengkomodir kesetaraan jender dimana sekitar 61,92% PNS dalam Pemerintahan Kota Ternate berasal dari kalangan perempuan.

Dari total 4.838 PNS tersebut, 837 diantaranya menduduki jabatan struktural di seluruh instansi di bawah Pemerintahan Kota Ternate. Dari 837 PNS dengan jabatan struktural, 54,48% berjenis kelamin laki-laki. Jumlah PNS menurut tingkat eselon dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Berdasarkan golongan kepangkatan, 2.760 PNS atau sebanyak 57.05% termasuk golongan III. Jumlah PNS menurut golongan kepangkatan dan jenis kelamin di Kota Ternate tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Berdasarkan **Perda Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016**, Pemerintah Kota Ternate membawahi 22 Institusi Dinas, 5 Institusi Badan Daerah, 1 Kantor Pendukung, 3 Sekretariat, 8 Kecamatan, 11 Puskesmas di Kota Ternate, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.5
Jumlah PNS Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sampai dengan SD	10	0	10
2. SMP/Sederajat	19	2	21
3. SMA/Sederajat	699	797	1.496
4. Diploma I, II, III	137	595	732
5. Diploma IV/Sarjana	905	1.547	2.452
6. S2 (Master) / S3 (Doktor)	72	55	127
Jumlah	1.842	2.996	4.838

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate

Tabel 4.6
Jumlah PNS Menurut Tingkat Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Tingkat Eselon	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Eselon II	28	7	35
2. Eselon III	128	43	171
3. Eselon IV	298	323	621
4. Eselon V	2	8	10
Jumlah	456	381	837

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate

Tabel 4.7
Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Golongan Kepangkatan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
I/A (Juru Muda)	0	0	0
I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	1	3
I/C (Juru)	9	0	9
I/D (Juru Tingkat I)	5	0	5
Golongan I	16	1	17
II/A (Pengatur Muda)	81	37	118
II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	157	115	272
II/C (Pengatur)	221	209	430
II/D (Pengatur Tingkat I)	127	198	325
Golongan II	586	559	1.145
III/A (Penata Muda)	176	375	551
III/B (Penata Muda Tingkat I)	270	560	830
III/C (Penata)	236	506	742
III/D (Penata Tingkat I)	239	398	637
Golongan III	921	1.839	2.760
IV/A (Pembina Muda)	245	555	800
IV/B (Pembina Muda Tingkat I)	49	31	80
IV/C (Pembina)	25	10	35
IV/D (Pembina Tingkat IV)	0	1	1
Golongan IV	319	597	916
Jumlah	1.842	2.996	4.838

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate

Tabel 4.8
Jumlah PNS Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan
Jenis Kelamin di Kota Ternate, 2017

Dinas/ Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekretaris Daerah	1	0	1
2. Asisten Pemerintahan dan Sosial	1	0	1
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	1	0	1
4. Asisten Administrasi	1	0	1
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	1	0	1
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	1	0	1
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1	0	1
8. Bagian Humas dan Protokoler	12	7	19
9. Bagian Perlengkapan	9	6	15
10. Bagian Umum	21	13	34
11. Bagian Ekonomi dan Investasi	6	10	16
12. Bagian Kesejahteraan	6	10	16
13. Bagian Organisasi	7	8	15
14. Bagian Pemerintahan	6	9	15
15. Bagian Hukum dan HAM	3	8	11
16. Bagian Bina Administrasi Pembangunan	3	2	5
17. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	2	6	8

Lanjutan Tabel 4.8

Dinas/ Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(5)	(6)	(7)	(8)
1. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah	15	16	31
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman	26	16	42
3. Dinas Lingkungan Hidup	59	16	75
4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan UPTD	32	56	88
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25	28	53
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	20	35
7. Dinas Tenaga Kerja	10	14	24
8. Dinas Sosial	17	27	44
9. Dinas Pemuda dan Olahraga	24	11	35
10. Dinas Perhubungan	59	17	76
11. Dinas Komunikasi dan Persandian	12	9	21
12. Dinas Kelautan dan Perikanan	29	31	60
13. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	76	28	104
14. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan UPTD (Non Guru)	120	157	277
15. Dinas Ketahanan Pangan	13	18	31
16. Dinas Kebakaran	29	6	35
17. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UPTD	57	37	94
18. Dinas Kesehatan dan UPTD	18	88	106
19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	37	44
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22	45	67

Lanjutan Tabel 4.8

Dinas/ Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(9)	(10)	(11)	(12)
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	9	27	36
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap	11	30	41
Badan			
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	24	27	51
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	18	23	41
3. Badan Kesbangpol & Linmas	21	10	31
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi	39	31	70
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	25	38	63
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23	9	32
Inspektorat			
1. Inspektorat	22	21	43
Kantor			
1. Satuan Polisi Pamong Praja	38	8	46
Sekretariat			
1. Sekretariat DPRD	25	21	46
2. Sekretariat KPU	8	2	10
3. Sekretariat KORPRI	5	5	10

Lanjutan Tabel 4.8

Dinas/ Instansi Pemerintahan	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(13)	(14)	(15)	(16)
Puskesmas			
1. Puskesmas Kalumpang	3	51	54
2. Puskesmas Kota	6	54	60
3. Puskesmas Batang Dua	2	5	7
4. Puskesmas Kalumata	3	57	60
5. Puskesmas Gambesi	6	28	34
6. Puskesmas Moti	10	17	27
7. Puskesmas Sulamadaha	2	34	36
8. Puskesmas Mayau	4	20	24
9. Puskesmas Jambula	4	24	28
10. Puskesmas Perawatan Siko	9	71	80
11. Puskesmas Hiri	1	21	22
Kecamatan (termasuk Kelurahan)			
1. Kecamatan Ternate Selatan	69	92	161
2. Kecamatan Ternate Tengah	85	59	144
3. Kecamatan Ternate Utara	65	62	127
4. Kecamatan Moti	40	2	42
5. Kecamatan Pulau Batang Dua	26	6	32
6. Kecamatan Pulau Hiri	17	4	21
7. Kecamatan Pulau Ternate*	41	17	58
8. Kecamatan Ternate Barat	36	22	58
Sekolah			
1. Guru dan Tenaga Kependidikan	396	1.334	1.730
2. Tata Usaha di Sekolah	2	8	10
Jumlah	1.842	2.996	4.838

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate

4.4 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat guna terciptanya kehidupan berbangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu wujud implementasinya yaitu dibentuklah berbagai macam organisasi termasuk Ormas dan LSM yang diharapkan bisa menampung dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Ormas dan LSM ini diharapkan berperan dalam mendorong terciptanya suatu pembaharuan tatanan kehidupan berorganisasi serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Ormas dan LSM dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan atau tujuan baik di bidang agama, ideologi, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan.

Keberadaan Ormas juga menjadi salah satu wadah yang memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Sekalipun tidak mudah membedakan antara Ormas dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi biasanya berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-

kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan berorganisasi terbuka lebar. Setiap warga berhak berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa ada intervensi dari pemerintah. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legal tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Tabel berikut menyajikan jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar di Kota Ternate.

Tabel 4.9
Jumlah Ormas dan LSM yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Ternate, 2016 – 2017

Tahun	
2016	2017
(1)	(2)
27	29

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate

4.5 Kejadian Demonstrasi dan Kerusakan

Kejadian demonstrasi dan kerusakan menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat. Demonstrasi adalah kejadian saat sejumlah orang mengorganisasikan diri untuk melakukan protes tanpa disertai kekerasan. Biasanya dilakukan dengan cara orasi atau penyampaian pendapat secara terbuka. Pihak yang sering menjadi sasaran demonstrasi adalah pihak yang berwenang membuat

kebijakan terhadap hajat hidup orang banyak, misalnya pemerintah, pengusaha, pimpinan, dll.

Sedangkan kerusuhan atau huru-hara terjadi saat sejumlah orang melakukan tindakan kekerasan, bisa berupa kekerasan fisik, serangan bersenjata, perusakan barang/fasilitas umum, penjarahan, dan/atau tindakan anarkis yang mengakibatkan kekacauan di suatu tempat. Ada kerusuhan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan misalnya menuntut agar pihak tertentu melakukan hal yang diinginkan, tindak balas terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil, atau sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Selain itu, ada pula kerusuhan yang terjadi bukan karena hendak menyampaikan protes tapi karena adanya konflik antar golongan masyarakat.

Menurut informasi yang dihimpun dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, pada tahun 2017 terjadi peningkatan konflik sosial dalam masyarakat Kota Ternate dibanding tahun sebelumnya seperti yang tersaji pada Tabel 4.10. Pada tahun 2017 terjadi 90 demonstrasi (tanpa kerusuhan) di Kota Ternate atau turun 6,25% dibanding tahun 2016. Begitu pula dengan demonstrasi yang disertai kerusuhan dan kejadian kerusuhan itu sendiri, sedangkan pada tahun 2017 masing-masing terjadi 5 kasus, turun 44,4% dari tahun 2016.

Tabel 4.10
Jumlah Konflik Sosial Masyarakat Menurut Jenisnya di
Kota Ternate, 2016 - 2017

Konflik Sosial Masyarakat	2016	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1. Jumlah demonstrasi	96	90
2. Jumlah kerusuhan	9	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Ternate

<https://ternatekota.bps.go.id>



Statistika Keamanan

Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Hal ini jelas tersurat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “..... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Dalam perjalanan sejarah bangsa, seluruh pemimpin Bangsa Indonesia selalu berupaya untuk menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Indonesia.

5.2 Sarana dan Personil Keamanan

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Indonesia, maka organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan.

Dikutip dari www.polri.go.id organisasi Polri di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Untuk memberikan kenyamanan dalam hal keamanan di Kota Ternate, telah tersedia sarana dan personil keamanan yang mendukung yaitu berupa kantor polisi dan personilnya. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2017, jumlah kantor polisi di Kota Ternate yang terdiri dari Polres/Polresta, Polsek/Polsekta, Pos Polisi Subsetor, dan Pos Polisi tidak mengalami perubahan sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1.

Terwujudnya stabilitas keamanan di Kota Ternate tentu tidak terlepas dari tersedianya personil kepolisian yang handal. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kota Ternate dalam rentang tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan seperti yang tersaji pada Tabel 5.2. Dalam rentang 3 tahun, dapat dilihat bahwa polisi laki-laki sangat mendominasi dibanding polisi wanita. Pada tahun 2017, dari total 478 polisi, hanya 35 personil yang merupakan polisi wanita atau sekitar 7,32%.

Tabel 5.1
Jumlah Kantor Polisi di Kota Ternate, 2015 – 2017

Kantor Unit	2015	2016	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Polres/Polresta	1	1	1
2. Polsek/Polsekta	5	5	5
3. Pos Polisi Subsektor	3	3	3
4. Pos Polisi	3	3	3
Jumlah	12	12	12

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Tabel 5.2
Jumlah Personil Polisi di Kota Ternate, 2015 - 2017

Personil	2015	2016	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Polisi Laki-laki	469	499	443
2. Polisi Wanita	38	41	35
3. PNS Wanita	2	2	2
Jumlah	509	542	480

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

5.2 Jenis Tindak Kejahatan

Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan utama manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Teori Hierarki Kebutuhan Manusia (Abraham Maslow) yang menyatakan bahwa rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

Rasa aman menjadi suatu hal yang berharga, karena tidak ada satu daerah pun di muka bumi ini yang luput dari tindak kejahatan. Sehebat apapun kinerja aparat kepolisian, pasti ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang melanggar aturan/hukum sehingga merugikan orang lain. Tindak kejahatan tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

Berdasarkan catatan di Polres Ternate, jumlah tindak kejahatan (*crime total*) adalah jumlah seluruh tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian selama kurun waktu satu tahun. *Crime total* di Kota Ternate tahun 2015 – 2017 cenderung mengalami penurunan seperti yang tersaji pada Tabel 5.3.

Kejahatan tumbuh dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, untuk menanggulangnya dibutuhkan pemahaman apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan. Berbagai cara telah diterapkan untuk menanggulangi tindak kejahatan mulai dari membuat peraturan perundang-undangan yang berisi sanksi tegas; membentuk aparat penegak hukum mulai dari polisi selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum, hakim selaku pemutus perkara, serta pengacara selaku pembela; ternyata belum mampu menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini. Para pelaku kejahatan seolah-olah selalu mencari celah untuk melakukan berbagai jenis tindak kejahatan.

Sepanjang tahun 2017, terdapat 93 tindak kejahatan yang terjadi di Kota Ternate. Jumlah ini menurun 59,21% dibanding tahun sebelumnya. Kasus terbanyak yang dilaporkan ke Kepolisian Resort Ternate tahun 2017 yaitu Penganiyaan (termasuk penganiyaan berat dan ringan) sebanyak 15,05% dari total kasus. Terbanyak kedua yaitu Pencurian Biasa sebanyak 13,98% disusul Pencurian dengan pemberatan sebanyak 8,60%.

Tabel 5.3
Jumlah Kejahatan Menurut Kasusnya di Kota Ternate, 2015 – 2017

Kasus Kejahatan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pembunuhan	1	1	0
2. Penganiayaan Berat (Anirat) & Penganiayaan Ringan (Anira)	56	48	14
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	8	17	3
4. Perkosaan	1	0	1
5. Pencabulan	2	0	1
6. Penculikan	0	0	0
7. Pencurian Dengan Kekerasan (Curas)	0	2	0
8. Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	50	32	13
9. Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor)	0	11	2
10. Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	0	6	8
11. Pengrusakan/Penghancuran Barang	2	11	2
12. Kebakaran/Pembakaran	1	2	2
13. Narkotika Dan Psicotropika	0	0	0
14. Penggelapan	7	7	2
15. Korupsi	0	1	0
16. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0
17. Penipuan	0	8	2
18. Pencemaran Nama Baik	0	0	0
19. Kawin tanpa Izin	0	2	0
20. Pengancaman	1	0	0
21. Perjudian Togel	19	5	6
22. Perjudian Kartu Joker	4	6	3
23. Perjudian Dadu	0	0	0
24. Judi sambung tulang	0	0	0
25. Penebangan Liar	0	0	0

Lanjutan Tabel 5.3

Kasus Kejahatan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
26. Pengeroyokan	30	26	7
27. Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0
28. Penyalahgunaan BBM	0	0	0
29. Perzinahan	0	4	1
30. Penyerobotan tanah	3	0	1
31. Pemilikan sajam/handak	0	3	1
32. Penipuan penggelapan	20	8	6
33. Persetubuhan di bawah umur	6	7	3
34. Penelantaran	1	2	3
35. Kekerasan terhadap anak	8	6	4
36. Aborsi	0	0	0
37. Persetubuhan	0	0	0
38. Penemuan kerangka manusia	0	0	0
39. Pembajakan VCD	0	0	0
40. Penghinaan	5	1	0
41. Pelanggaran Pemilihan Gubernur	2	0	0
42. Penghinaan dan pencemaran nama baik melalui medsos	1	2	1
43. Pencurian dan penggelapan	1	0	0
44. Pemalsuan tanda tangan	2	0	0
45. Keterangan palsu	1	0	0
46. Pengeroyokan mengakibatkan meninggal dunia	0	1	2
47. Membawa lari anak gadis	0	2	0
48. Pencabulan di bawah umur	0	5	5
49. Kejahatan keamanan negara	0	1	0
50. Penyelundupan Satwa	0	1	0
Jumlah	237	228	93

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Mengutip ulasan dalam polmas.wordpress.com, tindak kejahatan dapat dikategorikan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan konvensional/nasional, merupakan kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis, baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Misalnya kekerasan, pencurian, pembunuhan, penipuan, penggelapan, pemerkosaan, pembunuhan, dll;
2. Kejahatan transnasional, merupakan kejahatan terorganisir yang terjadi lintas perbatasan negara yang berdampak pada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya, dan ekonomi suatu negara dan bersifat global;
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara, merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara yang dilakukan oleh perseorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan). Misalnya korupsi, perdagangan satwa, penebangan liar, dll;
4. Kejahatan berimplikasi kontijensi, merupakan kejahatan yang dapat mengganggu aspek-aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi serta meresahkan masyarakat yang terjadi secara mendadak dan sulit diprediksi.

Keempat jenis kejahatan tersebut akan menjadi tantangan yang dihadapi pihak kepolisian saat ini dan yang akan datang.

Tabel 5.4
Jumlah Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota Ternate, 2015 - 2017

Jenis Kejahatan	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Kejahatan konvensional	237	228	93
2. Kejahatan transnasional	0	0	0
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara	6	0	0
4. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi	0	0	0
Jumlah	237	228	93

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa jenis kejahatan di Kota Ternate selama tahun 2015 - 2017 didominasi oleh kejahatan konvensional/nasional yang jumlahnya sangat tinggi diatas 98%. Sedangkan kejahatan terhadap kekayaan negara yang jumlahnya sangat kecil, dibawah 2%. Selain itu juga dapat diketahui bahwa kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontijensi belum terjadi di Kota Ternate selama 3 tahun terakhir.

Tabel 5.5
Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenisnya di Kota
Ternate, 2015 – 2017

Jenis Tindak Pidana	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Terhadap Fisik Manusia	122	128	46
2. Terhadap Hak Milik (Barang)	114	100	47
3. Penyalahgunaan Narkoba	0	0	0
Jumlah	236	228	93

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: tindak pidana terhadap fisik manusia, tindak pidana terhadap hak milik (barang), serta tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Tabel 5.5 dapat diketahui bahwa tindak pidana di Kota Ternate selama tahun 2015 – 2017 untuk tindak pidana terhadap fisik manusia dan terhadap hak milik (barang) memiliki nilai yang cenderung seimbang dan berada di kisaran 50%, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba belum pernah terjadi di Kota Ternate selama tahun 2015 - 2017. Hal ini menunjukkan indikasi baik namun juga harus menjadi kewaspadaan kedepannya dengan dilakukan upaya preventif oleh aparat kepolisian maupun seluruh lapisan masyarakat agar Kota Ternate tetap bebas dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

5.3 Indikator Utama Kejahatan

Beberapa indikator utama kejahatan di Kota Ternate tahun 2015 – 2017 tersaji pada Tabel 5.5. Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) menunjukkan jumlah seluruh tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian pada rentang waktu satu tahun.

Selama tiga tahun terakhir, tindak kejahatan paling banyak terjadi pada tahun 2015 namun secara persentase penyelesaian perkara memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 48,31%. Pada tahun-tahun setelahnya *Crime Cleared* selalu mengalami kenaikan dan pada puncak tertingginya pada tahun 2017, yaitu sebesar 74,19%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan usaha kepolisian untuk meningkatkan rasa aman bagi masyarakat. Idealnya, pihak kepolisian dapat menangani seluruh *crime total* yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Namun ternyata belum semua *crime total* berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian di Kota Ternate.

Selain melalui *crime total*, *crime cleared*, dan *clearenace rate*, terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kriminalitas di suatu daerah yaitu melalui selang waktu terjadinya tindak pidana (*crime clock*). *Crime clock* menunjukkan rata-rata selang waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan tindak kejahatan berikutnya. Semakin besar nilai indikator ini semakin baik, karena menunjukkan tindak kejahatan yang semakin jarang terjadi.

Hal ini berarti juga resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime risk*) menurun karena selang waktu terjadinya kejahatan semakin lama. Sebaliknya, semakin kecil nilai *crime clock* menunjukkan semakin sering terjadi tindak kejahatan di wilayah tersebut.

Selama tiga tahun terakhir, terlihat bahwa *crime clock* di Kota Ternate semakin tinggi yang artinya semakin baik karena tindak kejahatan semakin jarang terjadi. Hal ini juga menggambarkan bahwa selama 3 tahun terakhir, kondisi keamanan paling kondusif di Kota Ternate adalah pada tahun 2017, dimana terjadi satu tindak kejahatan setiap 94 jam 11 menit 36 detik.

Risiko penduduk mengalami tindak kejahatan (*crime rate*) menunjukkan besarnya peluang penduduk berisiko mengalami tindak kejahatan. Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi semakin baik karena semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana. Konstanta yang dipakai dalam penghitungan ini adalah 100.000 yang menunjukkan *crime rate* setiap 100.000 penduduk.

Selama tiga tahun terakhir nilai *crime rate* menunjukkan nilai yang semakin kecil. Hal ini berindikasi baik karena peluang penduduk mengalami tindak kejahatan semakin kecil. Pada tahun 2015, jumlah penduduk yang berisiko mengalami tindak kejahatan setiap 100.000 penduduk diperkirakan 128 orang. Nilainya menurun pada tahun 2016 sebesar 107 orang, dan kembali turun pada tahun 2017 yaitu sebesar 107 orang. Diharapkan *crime rate* di Kota Ternate

mengalami penurunan untuk tahun-tahun selanjutnya, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman.

Tabel 5.6
Indikator Utama Kejahatan di Kota Ternate,
2015 - 2017

Indikator Utama Kejahatan	2015	2016	2017
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Jumlah Tindak Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	236	228	93
2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	114	142	69
3. Persentase Penyelesaian Perkara (<i>Clearence Rate</i>)	48,31	62,28	74.19
4. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (<i>Crime Clock</i>)	36.57.36	38.31.48	94.11.36
5. Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	128	107	41

Sumber: Kepolisian Resort Ternate

Kesimpulan

<https://ternatekota.bps.go.id>

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang disajikan pada publikasi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi politik dan keamanan di Kota Ternate yang kondusif menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pendidikan dan pemahaman politik masyarakat Kota Ternate masih perlu ditingkatkan karena belum seluruh warga yang mempunyai hak pilih turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
3. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Ternate harus menjadi pedoman bagi partai politik dalam proses kaderisasi.

<https://ternatekota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TERNATE**

Jl. Cengkeh Afo No 262, RT. 002/RW. 001, Kel. Marikurubu,
Kec. Ternate Tengah, Ternate 97711
(0921) 3121650 • ternatekota.bps.go.id • bps8271@bps.go.id